



KEBIJAKAN FISKAL DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016

Paparan Menteri Keuangan pada
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun 2016

Jakarta, 29 April 2015



POKOK BAHASAN

1. Pendahuluan

2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2015-2016

3. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2016

4. *Resource Envelope* Pagu Indikatif RAPBN 2016

5. Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Anggaran

6. Penutup



PENDAHULUAN ..(1)



- Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun pertama (secara penuh) dari Pemerintahan Kabinet Kerja, sehingga anggaran tahun 2016 menampung secara utuh kebijakan dan program dari Pemerintahan Kabinet Kerja.
- RAPBN tahun 2016 merupakan tahun kedua dari RPJMN tahun 2015-2019:
 - Merupakan langkah bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kerjasama yang lebih baik dalam berbagai program pembangunan nasional dan tahun-tahun ke depan.
 - Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada keunggulan kompetitif perekonomian.

3





PENDAHULUAN..(2)



- Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan fiskal tahun 2016 adalah:
 - Defisit dikendalikan pada tingkat yang *sustainable* (lebih rendah dari APBNP 2015), dengan tetap memperhatikan peran APBN dalam perekonomian.
 - Mengoptimalkan pendapatan negara baik perpajakan maupun PNBPN.
 - Pengendalian dan peningkatan kualitas belanja negara baik belanja pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa.
 - Melanjutkan program-program prioritas di tahun 2015;
 - Memenuhi anggaran kesehatan → 5% APBN;
 - Memperkuat desentralisasi fiskal.



4



2 **Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2015-2016**

7

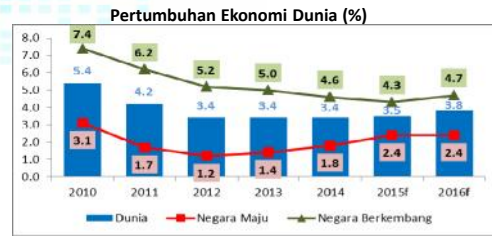
Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2015-2016

Indikator	2015		2016
	APBNP	Outlook	
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,7	5,2 - 5,7	5,8 - 6,6
b. Inflasi (% , yoy)	5,0	4,0 - 5,0	3,0 - 5,0
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	6,2	5,0 - 7,0	4,0 - 6,0
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	12.500	12.500 - 13.000	12.800 - 13.200
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	60	55 - 60	60 - 80
f. Lifting Minyak (ribu barell per hari)	825	825	830 - 850
g. Lifting Gas (ribu barell setara minyak per hari)	1.221	1.221	1.100 - 1.200

8



Di tahun 2015 dan 2016 perekonomian global diperkirakan meningkat namun masih pada taraf relatif lemah



Sumber: WEO-IMF, 2015

	2011	2012	2013	2014	2015f	2016f
Dunia	4.2	3.4	3.4	3.4	3.5	3.8
Negara Maju	1.7	1.2	1.4	1.8	2.4	2.4
Amerika Serikat	1.6	2.3	2.2	2.4	3.1	3.1
Inggris	1.6	0.7	1.7	2.6	2.7	2.3
Kawasan Eropa	1.6	-0.8	-0.5	0.9	1.5	1.7
Perancis	2.1	0.3	0.3	0.4	1.2	1.5
Jerman	3.7	0.6	0.2	1.6	1.6	1.7
Italia	0.6	-2.8	-1.7	-0.4	0.5	1.1
Spanyol	-0.6	-2.1	-1.2	1.4	2.5	2.0
Yunani	-8.9	-6.6	-3.9	0.8	2.5	3.7
Portugal	-1.8	-4.0	-1.6	0.9	1.6	1.5
Jepang	-0.5	1.8	1.6	-0.1	1.0	1.2
Negara Berkembang	6.2	5.2	5.0	4.6	4.3	4.7
Tiongkok	9.3	7.8	7.8	7.4	6.8	6.3
India	6.6	5.1	6.9	7.2	7.5	7.5
ASEAN 5	4.6	6.1	5.2	4.6	5.2	5.3

Outlook 2015, walaupun diperkirakan adanya perbaikan kinerja ekonomi negara maju, namun masih terdapat risiko.

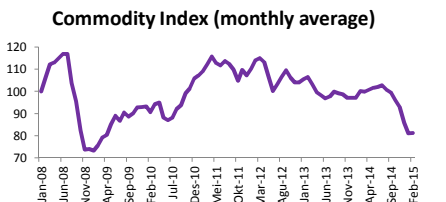
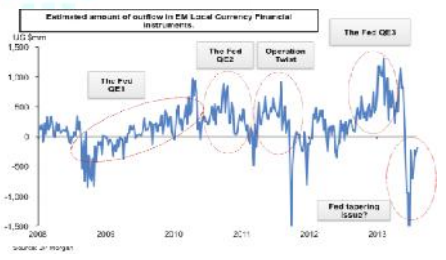
- Perbaikan ekonomi terlihat di Amerika Serikat (AS), dan menjadi dasar berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter, khususnya kebijakan kenaikan suku bunga The Fed.
- Eropa dan Jepang masih mengalami tekanan ekonomi, khususnya risiko deflasi. Kebijakan moneter cenderung longgar (stimulus moneter).
- Tiongkok dipengaruhi pelemahan kinerja pasar properti, aktivitas industri serta investasi, dan berkurangnya angkatan kerja.
- India pertumbuhan meningkat didorong reformasi kebijakan pemerintah baru.
- Harga komoditas dunia yang masih rendah.

Outlook 2016, pertumbuhan ekonomi global sedikit meningkat, terutama didorong oleh perekonomian negara maju.

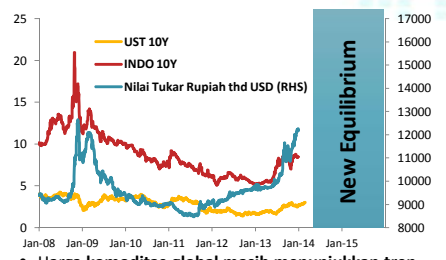
- Risiko dampak kenaikan suku bunga The Fed masih menjadi risiko pemulihan ekonomi berbagai negara.
- Kenaikan FFR dapat mengurangi impor AS dan menghambat pertumbuhan perdagangan dunia.
- Gejolak likuiditas global akibat kenaikan FFR dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi di negara lain.
- Ekonomi Tiongkok diperkirakan kembali melambat dan menjadi *downside risk* pertumbuhan ekonomi EM di sekitarnya (Asia).
- Perekonomian India masih cukup tinggi.



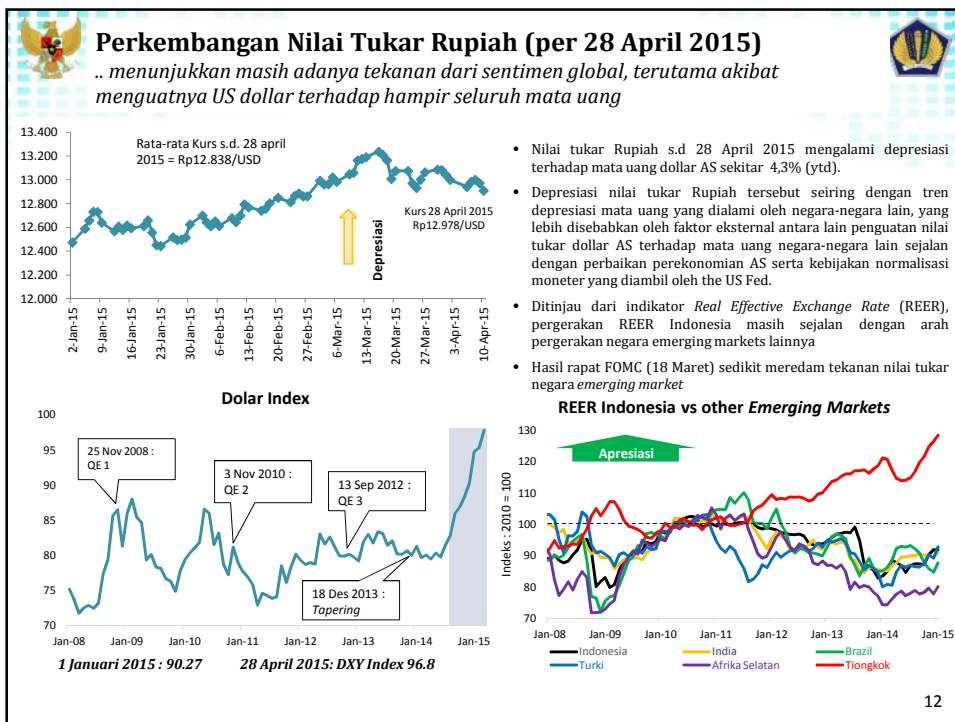
Risiko pada perekonomian global masih berlanjut ..menuju kondisi equilibrium baru setelah berakhirnya era QE dari The Fed dan makin menurunnya harga komoditas



*Export Price Index dihitung menggunakan enam harga komoditas ekspor (coal, natural gas, palm oil, crude oil, rubber, and Copper)



- Harga komoditas global masih menunjukkan tren pelemahan seiring dengan menurunnya permintaan global. Commodity Boom telah berakhir.
- Pengurangan secara bertahap stimulus moneter di AS telah berdampak pada nilai tukar dan imbal hasil surat utang.
- Kondisi perekonomian global saat ini telah amat berbeda dengan kondisi 4 tahun terakhir dimana pada periode tersebut dunia menikmati stimulus moneter dan harga komoditas yang tinggi.
- Ekonomi global sedang bergerak menuju "New Equilibrium".





3

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2016

13

Pokok-Pokok Kebijakan Pendapatan Negara 2016

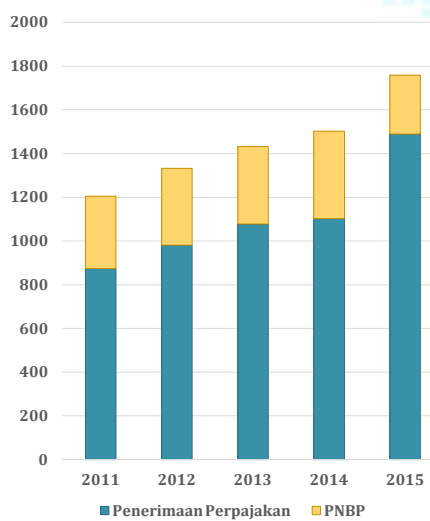


Perpajakan

- Meningkatkan *tax ratio* menjadi sekitar 14% (termasuk SDA migas dan pertambangan).
- Meningkatkan kepatuhan WP melalui *law enforcement* (pemeriksaan dan penyidikan)
- Memperluas *tax base*.
- Pengajuan usul barang kena cukai baru.

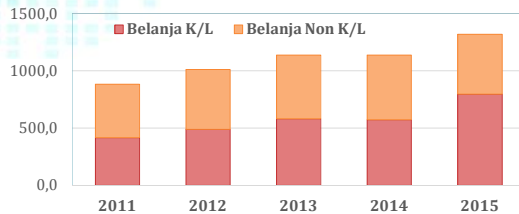
PNBP

- Mengoptimalkan penerimaan SDA migas → menahan turunnya *lifting*.
- Mengoptimalkan penerimaan SDA Non Migas → pengawasan SDA pertambangan, kehutanan dan perikanan.
- Optimalisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN agar dapat mendorong peran BUMN sebagai *agent of development*.
- Memperbaiki peraturan perundang-undangan di bidang PNBP (mekanisme dan tarif).



14

Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat 2016



Belanja K/L

- Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan memerhatikan tingkat inflasi.
- Melanjutkan kebijakan efisiensi belanja barang operasional dan pengendalian belanja perjalanan dinas.
- Mendukung pelaksanaan program pembangunan seperti infrastruktur, ketahanan pangan, energi, kemaritiman dan pariwisata sesuai dengan RKP 2016.
- Penguatan SDM pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, UMKM.

Belanja Non K/L

- Pembayaran bunga utang tetap diarahkan untuk (i) memenuhi kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan jumlah untuk kesinambungan pembiayaan, (ii) menjaga efisiensi (a.l. melalui pemilihan komposisi instrumen utang dan melaksanakan transaksi lindung nilai).
- Menyediakan cadangan belanja (a.l. risiko fiskal, peningkatan PBI).
- Belanja hibah kepada pemda (penerusan PHLN, dan *Nationwide water hibah program*).
- Subsidi tepat sasaran.
- Mendukung pembangunan infrastruktur berupa kerjasama pemerintah swasta.

15

Pokok-Pokok Kebijakan Subsidi Tahun 2016

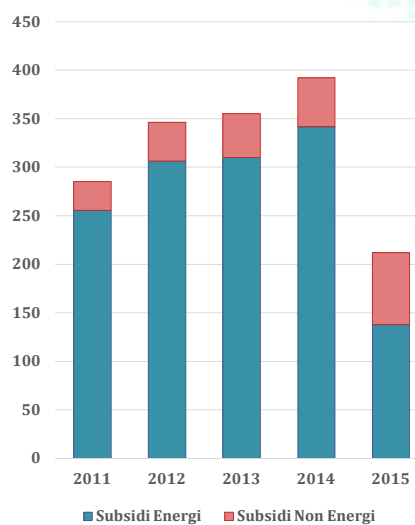


Subsidi Energi

- Memberikan subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar.
- Penerapan *tariff adjustment* untuk TTL.
- Perbaiki bauran energi input untuk pembangkit listrik.

Subsidi Non Energi

- Menyediakan Raskin kepada RTS selama 12 bulan sebesar 15 kg/RTS/bulan dengan harga jual Rp1.600/kg.
- Memenuhi kebutuhan pupuk dan benih petani dengan harga terjangkau dalam rangka meningkatkan produksi pertanian.



16

Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah & Dana Desa 2016

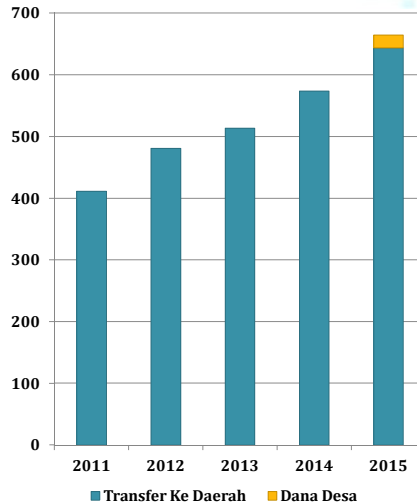


Transfer ke Daerah

- Melanjutkan kebijakan afirmatif DAK yang diprioritaskan pada bidang infrastruktur dasar → Meningkatkan alokasi DAK.
- Penajaman bidang DAK sehingga lebih efektif, selektif dan optimal pemanfaatannya.

Dana Desa

- Meningkatkan alokasi Dana Desa 2016 sehingga setara 6 persen dari dan diluar transfer ke daerah.
- Mengefektifkan program-program yang berbasis desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa

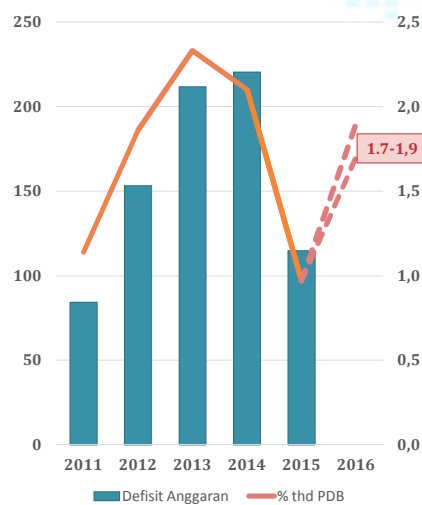


17

Pokok-Pokok Kebijakan Defisit dan Pembiayaan 2016



- Defisit diupayakan terus menurun, menjadi sekitar 1,7%-1,9% terhadap PDB.
- *Primary balance* diupayakan untuk terus membaik, sehingga menuju positif di tahun 2019.
- Pengendalian rasio utang terhadap PDB.
- Mendukung program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui alokasi dana bergulir untuk BLU PPP (FLPP).
- Melanjutkan pemberian beasiswa dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui program dana pengembangan pendidikan nasional.
- Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman pemerintah
- Mendukung peran BUMN sebagai agen pembangunan (*agent of development*) untuk mewujudkan program prioritas nasional (Nawacita) melalui alokasi PMN kepada BUMN.



18



3

Resource Envelope Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2016



PAGU INDIKATIF 2016




Pagu Indikatif K/L Tahun 2016 sebesar Rp807,7 triliun:

1. Bersifat *baseline*, dalam arti:
 - a. Belum menampung kebijakan baru
 - b. Telah memperhitungkan asumsi dasar ekonomi makro, *accres* (kenaikan alamiah) untuk belanja pegawai, tunjangan kinerja *existing*, serta memperhatikan sumber-sumber pendanaan baik dari PNBP/BLU, maupun pinjaman dan hibah (dalam dan luar negeri) dan SBSN PBS;
2. Dihitung dengan memperhatikan kinerja penyerapan 2014, proyeksi 2015, dan rencana tahun 2016 → Pagu masing-masing K/L **tidak harus naik** dibanding APBNP 2015;
3. Diprioritaskan untuk program/kegiatan yang bersifat strategis.

 ANGGARAN 10 BESAR K/L 2015 - 2016 				
Triliun Rupiah				
No	KODE BA	K/L	APBNP 2015	Pagu Indikatif 2016
1	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	118,5	102,6
2	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	102,3	97,9
3	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	51,3	75,4
4	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	57,1	62,5
5	025	KEMENTERIAN AGAMA	60,3	60,5
6	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	65,0	55,3
7	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	53,3	53,2
8	042	KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI	43,6	45,0
9	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	25,7	32,6
10	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	32,8	30,2
Jumlah 10 K/L Besar			609,8	615,0
Jumlah K/L Lainnya			185,7	173,3
Cadangan Belanja K/L			-	19,4
Jumlah			795,5	807,7

21

 	
5	Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Anggaran

22



Evaluasi Permasalahan Penyusunan RKA-K/L 2015



1. Perubahan nomenklatur beberapa K/L mempengaruhi pendokumentasian RKA-K/L dan DIPA, yang pada akhirnya berpengaruh pada penyerapan anggaran → Upaya percepatan penyelesaian DIPA terus dilakukan.
2. Adanya tambahan belanja hasil pembahasan (hasil optimalisasi) yang masih diblokir mengacu pada hasil reviu BPKP.
3. Kebijakan penghematan/pemanfaatan anggaran belanja perjalanan dinas dan meeting/konsinyering melalui *selfblocking* dan usul revisi pemanfaatan → perlu dilakukan sejak awal penganggaran sehingga tidak menghambat penyerapan.

23



Upaya Peningkatan Kualitas Anggaran dari Sisi Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran



1. Memperjelas hubungan yang logis antara alokasi anggaran (input) dengan output dan *outcome* program dalam kerangka penerapan *Performance Based Budgeting* melalui arsitektur dan informasi kinerja (ADIK).
2. Mengurangi pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dan kurang produktif, a.l. belanja perjalanan dinas dan meeting/konsinyering.
3. Peranan APIP K/L dalam melakukan *review* RKAKL harus ditingkatkan, guna menjaga *governance* dan akuntabilitas.
4. Dalam rangka pemanfaatan dana optimalisasi 2016 (jika ada), K/L agar memerhatikan kriteria pemanfaatannya, a.l. arah kebijakan yg ditetapkan dalam RKP, dan sesuai arahan/keputusan Presiden dalam Sidang Kabinet.
5. Penerapan sistem informasi (SPAN) secara lebih baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran → perlu dukungan dan kepedulian dari K/L.
6. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja

24



6

PENUTUP

25



HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN..(1)



Dalam rangka keberhasilan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, diharapkan K/L dan Pemda memperhatikan hal-hal berikut:

1. Untuk peningkatan kerjasama yang lebih baik perlu sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - o Pendanaan atas kegiatan sesuai dengan kewenangan/urusan
 - o Pendanaan untuk kegiatan sejalan → hasilnya optimal. Sebagai contoh pembangunan irigasi harus dilakukan secara terkoordinasi.
2. K/L perlu menyusun rencana penyerapan anggaran per bulan dengan lebih baik sesuai dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan untuk menjaga pengelolaan *cash flow* Pemerintah Pusat.
3. Seluruh K/L dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja laporan keuangan dan mendapatkan opini WTP dari BPK.

26



HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN.. (2)



1. Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2016 serta RKP dan Prioritas Anggaran 2016 bersama dengan DPR dalam forum Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2016 → **K/L diharapkan mempersiapkan dengan baik pembahasan rencana kerja K/L bersama Komisi mitra kerjanya.**
2. Untuk memperbaiki capaian sasaran dan penyerapan anggaran belanja K/L di Tahun 2016 (Pagu anggaran tahun 2016) → **K/L diharapkan dapat mempersiapkan penyusunan dan perencanaan anggaran yang lebih baik.**
3. Rencana Kerja dan Anggaran K/L harus sejalan dengan **prioritas pembangunan dan tugas pokok masing-masing K/L** untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2016.
4. Penyelesaian proses penyusunan anggaran harus tepat waktu dan disiplin, baik dalam pembahasan intern Pemerintah maupun dengan DPR (Komisi).
5. Pengajuan usulan anggaran K/L harus satu pintu melalui Pemerintah (c.q. Kementerian Keuangan dan BAPPENAS)

27



TERIMA KASIH

28



ANGGARAN BELANJA K/L 2015-2016 (1)



Triliun Rupiah

NO	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBNP 2015	PAGU INDIKATIF 2016
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1,0	1,0
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5,2	4,7
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3,0	3,6
4	005	MAHKAMAH AGUNG	8,6	9,0
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4,7	4,8
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2,1	2,1
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	6,1	6,0
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	6,3	6,3
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	102,3	97,9
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	11,2	10,3
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	25,7	32,6
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	32,8	30,2
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	4,5	3,9
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15,1	9,4
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	65,0	55,3
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	53,3	53,2
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	51,3	75,4
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	60,3	60,5
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	4,2	4,4
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	22,4	10,6
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6,7	7,2
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	10,6	10,1

29




ANGGARAN BELANJA K/L 2015-2016 (2)





Triliun Rupiah

NO	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBNP 2015	PAGU INDIKATIF 2016
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	118,5	102,6
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	0,5	0,5
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0,3	0,3
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	0,4	0,4
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	2,4	2,6
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	0,1	0,1
29	042	KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI	43,6	45,0
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1,6	1,6
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,2	0,3
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	0,2	0,2
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2,6	2,0
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,7	1,0
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0,1	0,0
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	5,0	6,8
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1,1	1,4
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5,6	7,2
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,5	0,5
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,9	5,4
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	57,1	62,5
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1,2	1,5
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0,4	0,3
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	0,6	0,6

30

 ANGGARAN BELANJA K/L 2015-2016 (3) 				
Triliun Rupiah				
NO	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBNP 2015	PAGU INDIKATIF 2016
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1,4	1,6
46	067	KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI	9,0	8,0
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3,3	3,4
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	0,1	0,1
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1,8	1,9
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1,6	1,8
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	0,2	0,3
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0,1	0,1
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1,3	1,4
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	0,9	0,9
55	081	BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1,0	1,1
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	0,7	0,9
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	0,7	1,1
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	0,2	0,1
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	0,1	0,2
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0,3	0,3
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0,2	0,2
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	0,6	0,6
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1,7	1,8
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3,5	4,1
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	3,0	3,4
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	0,9	0,9

31

 ANGGARAN BELANJA K/L 2015-2016 (4) 				
Triliun Rupiah				
NO	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBNP 2015	PAGU INDIKATIF 2016
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,1	1,1
68	100	KOMISI YUDISIAL RI	0,1	0,1
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1,7	1,3
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	0,4	0,4
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	0,8	0,7
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	0,2	0,2
73	107	BADAN SAR NASIONAL	2,6	2,4
74	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	0,1	0,1
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	0,3	0,3
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	0,1	0,1
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	0,2	0,2
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1,1	1,2
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	0,3	0,3
80	114	SEKRETARIAT KABINET	0,2	0,2
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	0,5	0,4
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	0,9	0,9
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	0,9	1,1
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	0,2	0,3
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	0,1	0,1
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	1,5
		CADANGAN BELANJA K/L 2016	-	19,4
		JUMLAH	795,5	807,7

32